

ABSTRAKSI

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) sedangkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika, bahkan debitor juga harus dilepaskan dari tahanan. Dari kedua ketentuan ini masih terbuka permasalahan yang perlu dicarikan solusi terbaik untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditor namun kepentingan-kepentingan publik juga tidak boleh diabaikan. Jika memang negara berhak melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor bukan saja untuk sekedar kepentingan pembuktian pidana tetapi juga jika ternyata dikemudian hari ternyata perlu dilakukan perampasan maka hal ini juga harus diakomodir dan dicarikan mekanisme penyelesaiannya demi menjamin kepentingan umum.

Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus diperoleh kesimpulan yaitu kepentingan publik adalah diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga terhadap harta pailit yang dilakukan sita pidana sebelum putusan pailit harus dinyatakan tetap berlaku dengan memperhatikan : harta pailit yang disita pidana hanya sebatas untuk kepentingan pembuktian di persidangan, bukan milik debitor, serta dalam pemberesannya negara mendapatkan hak preferensi karena kerugian keuangan negara dapat disamakan sebagai utang kepada negara.

Kata Kunci : *Pailit, Penuntut Umum, Sita, Pidana*

ABSTRACT

Article 39 paragraph (2) of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law states that objects that are in confiscation due to a civil case or because of bankruptcy can also be confiscated for the purpose of investigating and prosecuting criminal cases, as long as they meet the provisions of paragraph (1) whereas Article 31 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations stipulates that the decision on a bankruptcy statement results in all judgments regarding the implementation of the court of the debtor's assets that have started since bankruptcy must be stopped immediately, even the debtor must also be released from detention. Of the two provisions, there are still open issues that need to find the best solution to achieve the goal of providing legal protection and legal certainty to creditors, but public interests must also not be ignored. If the state has the right to confiscate the assets of the debtor not only for the sake of criminal evidence but also if it turns out that in the future it will be necessary to seize it, this must also be accommodated and a resolution mechanism is sought to ensure the public interest.

With normative research and statutory approach, conceptual approach and case approach concluded that public interests are above personal and group interests so that bankruptcy assets carried out before confiscation of bankruptcy must be declared to remain in force by taking into account: Criminal confiscation is limited to the interests of evidence at the trial, not the debtor's possession, and in its issuance the state gets the right of preference because state losses can be equated as debt to the state.

*Keywords : **Bankruptcy, Prosecutor, Forfeiture, Criminal***